

**PANDANGAN**  
**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F-PKS)**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**TERHADAP**

**1. PMN TUNAI KE BUMN TAHUN 2023**

**2. PMN NON TUNAI KE BUMN TAHUN 2023**

=====

Disampaikan oleh : Amin Ak

Nomor Anggota : A-447

***Bismillahirrahmanirrahiim,***

***Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.***

***Salam Sejahtera untuk kita semua.***

**Yang kami hormati:**

- Pimpinan dan Para Anggota Komisi VI DPR RI**
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah SAW, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

**Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,**

Tahun Anggaran 2023 ini, ada 10 BUMN yang akan menerima PMN, dengan jumlah total Rp.69,82 Triliun. Ini jumlah yang sangat besar sehingga penggunaannya pun perlu optimal.

Beban APBN tahun 2023 ini sangat berat, defisit APBN tahun 2023 pada kisaran Rp562,6 triliun hingga Rp596,7 triliun atau 2,81 - 2,95 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dilihat dari sisi prioritasnya, PMN untuk beberapa BUMN harus diarahkan kepada

pemulihan ekonomi paska pandemi. Misalnya Aviata diusulkan mendapatkan PMN Rp.9,5 triliun pengembangan Infrastruktur pariwisata dan penyelesaian proyek KEK Mandalika (Lombok, NTB). KEK Mandalika ini merupakan salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas nasional yang ditetapkan melalui PP 52 Tahun 2014 tentang KEK Mandalika, atau HK diusulkan mendapatkan PMN Rp.30,56 Triliun di RAPBN 2023 ini, yang akan digunakan untuk pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I dan II. Proyek-proyek seperti ini harus benar-benar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dampaknya untuk rakyat benar-benar bisa dirasakan.

Fraksi PKS memandang bahwa beberapa BUMN yang menerima PMN berkali-kali harus di evaluasi lebih serius dan detail. Fraksi PKS mencermati BPUI melalui Askrindo dan Jamkrindo sudah menerima PMN Rp. 6 Triliun pada tahun 2020, untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hutama Karya juga sudah menerima PMN Rp.6,2 T (2021) dan Rp.7,5 T (2020). BUMN HK ini tidak sehat. Tol Trans Sumatera sudah tersambung 513 km, tapi trafficnya masih sangat rendah. IRR nya hanya 7% (Juli 2020). Jalan tol yang dibangun masih sepi. Ini akan rawan kejahatan. Perlu ada patroli keamanan. Tapi ini akan menambah operasional cost.

Demikian juga dengan Waskita Karya, ada Kasus Bangun-Jual Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. BUMN Paling Tidak Sehat, karena penurunan Pendapatan mencapai 48,42%, Rasio Hutangnya sudah 3,92 kali dibanding Ekuitas, dengan hutang yang menumpuk hingga Rp64,9 triliun.

Terkait PMN untuk Defend ID yang salah satunya diperoleh PT. PAL Indonesia. Namun PT PAL yang bergerak di bidang industri galangan kapal ini sudah seringkali mendapat kucuran PMN tetap saja merugi. Hampir sepanjang 10 tahun terakhir, PT PAL jadi BUMN yang "spesialis merugi." Berdasarkan catatan yang dirilis Kementerian BUMN, PAL mengalami rugi pada tahun 2012 sebesar Rp.125 miliar, lalu tahun 2013 rugi sebesar Rp.382 miliar. Tahun 2014 sempat untung sebesar Rp.10 miliar. Namun tahun 2015 kembali rugi Rp.187 miliar, dan tahun 2016 rugi Rp.395 miliar. Dan tahun 2018 rugi Rp.304 miliar.

Kerugian perusahaan ini diakibatkan oleh meningkatnya beban lain-lain hingga tiga kali lipat dan kerugian entitas anak perusahaan. Padahal PAL sudah cukup banyak menerima kucuran PMN dari negara. Tahun 2011 menerima PMN Rp.313 miliar untuk pengembangan usaha dan modal kerja. Tahun 2012, PAL kembali menerima PMN Rp.600 miliar. Dan tahun 2018 juga mendapatkan PMN Rp.1,5 triliun.

Ditengah kerugian terus menerus itu, PAL akan mendapatkan kucuran PMN lagi di 2021 ini, untuk pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam. Padahal track record pengadaan kapal selam batch pertama sangat bermasalah, yaitu proyek kapal selam Chang Bogo, kontrak tahun 2011.

Proyek Chang Bogo ini memperoleh PMN Rp.1,5 triliun di 2015 lalu. Lalu belum ada kejelasan dari PAL terkait progress proyek ini, termasuk output dan outcomenya. Lalu PAL mau masuk pengadaan kapal selam tahap 2 dengan skema whole local production. Pertanyaannya, PMN ini untuk kapal selam tahap 1 (melanjutkan) atau tahap 2, ini perlu ada kejelasan. Permasalahan kapal selam Chang Bogo batch pertama ini diduga sebagai proyek gagal. Ini terkait jangka waktu naik turunnya kapal selam ke dasar laut. Lalu diketahui, PAL juga melakukan skema pembelian lagi dengan skema kredit ekspor melalui PLN tahun 2020-2024, namun aliran uang dari pinjaman luar negeri (PLN) ini belum ada kejelasan. Seharusnya bila sudah ada skema pembiayaan ini, PAL tidak perlu lagi PMN.

### **Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,**

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan :

#### **PMN Tunai:**

1. **Menyetujui** PMN untuk PLN sebesar Rp10 Triliun yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor Pembangkit, Transmisi, Gardu Induk dan Distribusi, Program Listrik Desa dan Pembangkit EBT.
2. **Menyetujui dengan catatan** PMN LEN (Defend ID) sebesar Rp3 Triliun yang ditujukan untuk pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi

radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata dan meminta PAL dan Defend ID memperbaiki kinerja keuangan. Digunakan oleh 4 anak usaha dalam Induk Holding Defend ID, yaitu LEN Rp.367 Miliar, PAL Rp.897 Miliar, Pindad Rp.843 Miliar, PT Dirgantara Rp.900 Miliar. Dan meminta Realisasi penyerapan PMN APBN TA 2021 dioptimalkan (saat ini baru mencapai 1,78%).

3. **Menyetujui** PMN untuk ID FOOD sebesar Rp2 Triliun yang ditujukan untuk pengembangan Usaha Dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
4. **Menyetujui** PMN untuk Hutama Karya (HK) sebesar Rp. 30,56 T yang ditujukan untuk penugasan pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II. Angka PMN Rp.30,56 T ini turun dari permohonan sebelumnya sebesar Rp.36,78 T dikarenakan optimasi pendanaan dari kerjasama Asset Recycling jalan tol dengan INA (dan sudah termasuk pendanaan JTTS Tahap II).
5. **Menyetujui** PMN untuk INJOURNEY (AVIATA) sebesar Rp9,5T yang ditujukan untuk penugasan dan pengembangan usaha penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika.
6. **Menyetujui** PMN untuk IFG (BPUI) sebesar Rp6 Triliun yang ditujukan untuk pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo.
7. **Menunda** PMN untuk PT KAI sebesar Rp4, 10 Triliun yang ditujukan untuk penugasan Dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek KCJB. PMN dibutuhkan di tahun 2022 dan masih menunggu keputusan dari Komite KCJB sesuai Perpres 93/2021.
8. **Menyetujui** PMN untuk IndonesiaRe (RIU) sebesar Rp3 Triliun yang ditujukan untuk pengembangan usaha dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan.
9. **Menyetujui** PMN untuk DAMRI sebesar Rp0,87 Triliun yang ditujukan untuk penugasan dan pengembangan usaha dalam rangka penyediaan armada untuk

penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik untuk perkotaan melalui Buy The Service dan untuk meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan.

10. **Menyetujui** PMN untuk Airnav sebesar Rp0,79 Triliun yang ditujukan untuk penugasan dalam rangka mencapai seamless Air Traffic Management (ATM) di Kawasan Regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM system.

**PMN Non Tunai:**

1. **Menyetujui** PMN untuk DEFEND ID sebesar Rp 0,838 Triliun yang ditujukan untuk pengembangan usaha memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.
2. **Menyetujui** PMN untuk ID Food sebesar Rp 2,609 Triliun yang ditujukan untuk pengembangan Usaha Memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.

Terkait dengan **Rights Issue 7 BUMN**, Fraksi PKS **menerima dengan catatan** rights issue yang akan dilakukan oleh PT Krakatau Steel, SIG, Waskita Karya, Adhi Karya, Bank BTN, Semen Kupang, dan GIA, dengan catatan Pemerintah harus punya perencanaan yang kuat dan bersinergi dengan *stake holder*, serta melibatkan penjamin pelaksana aksi korporasi (entitas sekuritas), karena proses *rights issue* dapat menyebabkan saham Negara terdilusi.

Demikian pandangan Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih.

*Billahi taufiq wal hidayah*

*Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.*

Jakarta, 07 Juli 2022

**PIMPINAN  
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc, M.A**

**Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.PSi.T**